

KASUS TOLAK LAPORAN KORBAN PERAMPOKAN

Kapolda Metro: Provost Segera Lakukan Sidang Disiplin terhadap Aipda Rudi Panjaitan

JAKARTA (IM) - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran geram atas kelakuan salah satu anggota Polsek Pulogadung, Jakarta Timur Aipda Rudi Panjaitan, yang menolak laporan seorang korban penjambratan. Fadil menilai tindakan anggota itu, sangat melukai hati masyarakat.

Pernyataan tersebut diungkapkannya melalui akun Instagram resmi @kapolda-metrojaya, Selasa (14/12).

"Tadi malam kita dihebohkan lagi karena ada anggota Polsek Pulogadung yang aneh-aneh. Masyarakat datang melapor bukannya dilayani tetapi yang terjadi justru menyakitkan hati masyarakat," kata Fadil, dilansir dari Solopos.

Lebih lanjut, Fadil meminta Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) dan Kabid Propam menertibkan anggota SPKT di Polsek hingga Polres.

"Ini saya minta Pak Irwasda, Kabid Propam, SPKT-SPKT ini tolong ditertibkan para kapolsek ini juga," ujarnya.

Dia mengimbau agar Provost segera melakukan sidang disiplin terhadap Aipda Rudi. Dirinya ingin yang bersangkutan dimutasi ke luar area Polda Metro Jaya.

"Saya minta ini yang Jakarta Timur segera provost lakukan sidang disiplin, tuntut dia untuk mutasi tour of area, keluar dari Polda Metro Jaya," katanya.

Fadil menyebut, tindakan seperti itu dilakukan lantaran dirinya sayang terhadap para anggota. Namun, jika para anggota tak sayang terhadap diri sendiri, dia bisa memperlakukan hal yang sama.

"Saya sayang sama Anda tapi kalau Anda tidak sayang sama dirimu sendiri, saya akan perlakukan Anda seperti itu," ujarnya. ● lus

Hamili Istri Napi, Bripka IS Dijatuhi Sanksi Disiplin

PALEMBANG (IM) - Bripka IS dijatuhi sanksi disiplin terkait kasus perselingkuhan dengan IN, istri seorang istri narapidana hingga hamil 2 bulan.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Supriadi mengatakan, berdasarkan hasil sidang disiplin Bripka IS dijatuhi sanksi berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari, serta penundaan mengikuti pendidikan selama satu periode dengan masa pengawasan terhitung mulai tanggal 13 Desember 2021 sampai 13 Juni 2022.

"Bripka IS memiliki hak untuk melakukan upaya hukum melaporkan IN atas kasus pencemaran nama baik," katanya.

Fakta yang terungkap di sidang disiplin, Bripka IS menjalin hubungan asmara dengan IN, setelah yang bersangkutan sudah ditolak cerai

suaminya. Hal itu disertai dengan bukti forensik berupa video dan rekaman suara.

Meskipun pada dasarnya Bripka IS sudah memiliki istri tapi dalam kasus ini bukan masuk dalam ranah perzinahan. Dimana yang melaporkannya adalah kuasa hukum suami siri IN, dan bukan istri dari Bripka IS.

"Karena perzinahan itu, bila istrinya (Bripka IS) yang melapor. Tapi dalam kasus ini bukan dia yang melapor," katanya.

Selain itu, petugas juga akan mendalami pernyataan IN yang mengaku tengah hamil 2 bulan setelah berhubungan badan dengan Bripka IS. Mengingat pengakuannya sejauh ini banyak terdapat kebohongan atau tidak sesuai fakta. "Masih kita dalam apakah dia benar-benar hamil atau tidak. Akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut," pungkasnya. ● lus



IDN/ANTARA

RENCANA PEMBERLAKUAN TILANG ELEKTRONIK DI PALEMBANG

Pengendara melintas di bawah kamera pengawasan atau Closed Circuit Television (CCTV) yang terpasang di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/12). Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Selatan menargetkan penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mulai Januari 2022 mendatang dengan menambah sembilan kamera di sejumlah ruas jalan di Palembang.

Polda Metro Tetapkan Joseph Suryadi Tersangka Kasus Penistaan Agama

JAKARTA (IM) - Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sejak Rabu (15/12) menetapkan Joseph Suryadi sebagai tersangka penistaan agama.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Joseph sejak Selasa (14/12).

Joseph mengakui bahwa dia telah mengunggah tangkapan layar percakapan yang diduga menistakan agama.

"Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menetapkan tersangka terhadap pemosting video, Joseph Suryadi (39)," ujar Zulpan kepada wartawan, Rabu (15/12).

Joseph dijerat Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penyidik juga menjerat Joseph dengan Pasal 156 dan atau 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Ancaman hukuman 6 tahun penjara," kata Zulpan.

Barang bukti yang diamankan polisi dari Joseph

antara lain satu unit flashdisk dan ponsel, serta sejumlah gambar tangkapan layar percakapan di media sosial.

"Yang telah diamankan dan disita penyidik adalah satu bundel screenshot percakapan di medsos yang dianggap nistakan agama, satu buah flashdisk dan handphone," tandasnya.

Untuk diketahui, nama Joseph Suryadi ramai diperbincangkan di media sosial karena dugaan penistaan agama.

TAwalnya nama Joseph viral usai sebuah tangkapan layar percakapan di grup WhatsApp tersebar. Apabila diamati, tangkapan layar tersebut menampilkan ilustrasi dan pesan teks yang diduga menghina Nabi Muhammad SAW. Ilustrasi diduga dikirim oleh Joseph Suryadi.

Hal itu menuai kecamaran dari warganet hingga kemudian muncul tagar #Tangkap-JosephSuryadi di Twitter. Setelah itu, Polda Metro Jaya bergerak menyelidiki kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph. ● lus

12 | PoliceLine

IDN/ANTARA



UNGKAP KASUS UANG HASIL PERDAGANGAN NARKOBA INTERNASIONAL

Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi (tengah) didampingi Dir Res Narkoba Kombes Victor Siagian (kiri) memberikan keterangan pers saat ungkap kasus penangkapan kaki tangan bandar narkoba jaringan internasional di Mapolda Riau, Pekanbaru, Riau, Rabu (15/12). Polda Riau berhasil menangkap dua orang kaki tangan bandar narkoba dengan barang bukti uang tunai sebanyak Rp1,076 milyar yang berasal dari hasil perdagangan narkoba jaringan internasional.

Polri Izinkan Uji Coba Liga 1 dan 2 yang Dihadiri Penonton Secara Langsung

Penonton liga 1 dan 2 wajib menggunakan masker sejak awal hingga pertandingan berakhir. Pertandingan sendiri di gelar di wilayah yang laju pertumbuhan virus koronanya rendah.

JAKARTA (IM) - Polri memberikan izin kepada PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk melakukan uji coba penyelenggaraan sepakbola liga 1 dan 2 dengan dihadiri oleh penonton secara langsung.

Uji coba itu diberikan izin dengan catatan bahwa kapasitas penonton yang hadir secara fisik dilakukan secara terbatas karena saat ini masih terjadi Pandemi Covid-19.

"Polri memberikan izin uji coba penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2 dengan hadir

siannya sepakbola di tanah air. Tetapi, kami tetap menekankan penerapan protokol kesehatan harus tetap dilakukan dengan ketat," ujar Dedi.

Dalam uji coba itu, kata Dedi, penonton yang hadir secara fisik nantinya, wajib menggunakan masker sejak awal hingga pertandingan berakhir. Pertandingan sendiri di gelar di wilayah yang laju pertumbuhan virus koronanya rendah. Kemudian, masyarakat yang hadir wajib sudah mengantongi sertifikat vaksin Covid-19 dengan dosis kedua.

Nantinya, penonton juga harus mengakses aplikasi PeduliLindungi.

"Semua penonton, pemain, pihak sponsor hingga official harus benar-benar memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik," ucap Dedi.

Pada pemberian izin uji coba penonton terbatas ini, Dedi menyatakan, telah melakukan koordinasi dan komunikasi kepada seluruh pihak terkait. Tujuannya, agar penanganan dan pengendalian Covid-19 bisa tetap berjalan dengan baik.

Meski begitu, Dedi menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan evaluasi rutin ter-

kait dengan pelaksanaan uji coba kehadiran penonton secara terbatas di Liga 1 dan Liga 2 ini.

"Tentunya, kami dari Polri akan terus melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan. Sehingga, pelaksanaan tetap berjalan dengan baik namun faktor kesehatan harus tetap dikedepankan," kata Dedi.

● lus

Polisi Dalam Dugaan Pelanggaran Prokes Karantina Mulan Jameela dan Ahmad Dhani

JAKARTA (IM) - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, pihaknya akan mendalami dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) kekarantinaan Anggota DPR RI Mulan Jameela dan suaminya Ahmad Dhani.

Sebab, ada tuduhan di media sosial bahwa Mulan dan keluarganya tidak menjalani masa karantina selama 10 hari setelah pulang dari luar negeri.

"Nanti kita akan koordinasi apakah betul dalam 10 hari itu, sebelum 10 hari, yang bersangkutan ini keluar atau pun ke mal," kata Zulpan saat dihubungi, Rabu (15/12).

Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi terkait hal ini kepada pihak Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Menurut Zulpan, ranah pemantauan terkait pelaksanaan isolasi mandiri merupakan ranah Satgas Covid-19.

"Nanti kami akan berkoordinasi dengan Satgas Covid yang kemarin memberikan pilihan untuk isolasi di rumah. Kan kemarin Satgas Covid mengatakan bahwa akan dipantau oleh Satgas Covid," katanya.

Zulpan memastikan, jika ditemukan ada bukti pelanggaran maka polisi akan meminta keterangan dari Mulan dan Ahmad Dhani.

"Tapi kita ini dulu, tidak ingin terburu-buru dulu karena ini kan melibatkan leading sektornya Satgas Covid dalam hal penanganan ini, karantina itu," imbuhnya.

Mulan Jameela bersama suaminya Ahmad Dhani dan anak-anaknya dikabarkan tidak menjalankan karantina sepulang dari luar negeri. Kabar tersebut bermula saat pegiat media sosial Adam Deni mengaku menerima sebuah pesan dari seorang netizen yang dikirim melalui fitur direct message.

Pesan tersebut berisi pengakuan netizen melihat keluarga Ahmad Dhani saat di Turki pada 2 Desember. Akan tetapi, pada 9 Desember 2021, netizen itu mengatakan temannya melihat Ahmad Dhani dan Mulan Jameela sedang berada di pusat perbelanjaan kawasan Pondok Indah.

"Kalau mereka (Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelan) landing di Jakarta 3 Desember 2021 (dari Turki), apakah 9 Desember 2021 sudah selesai karantina," tulis netizen yang tak disebut namanya itu.

Pengacara Mulan dan Ahmad Dhani, Ali Lubis membantah kabar tersebut. Ali mengatakan, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela tidak bepergian ke mana pun sepulang dari Turki. ● lus

Polda Metro Gelar Diskusi dengan Komunitas Terkait Wacana Balap Liar akan Difasilitasi

JAKARTA (IM) - Dir Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyebutkan pihaknya tengah melakukan Focus Group Discussion (FGD) terkait wacana balap liar yang akan difasilitasi Polda Metro Jaya.

"Saat ini perkembangan persiapan sirkuit untuk komunitas balap liar, saat ini kami akan mengadakan FGD diskusi santai dengan para komunitas, IMI, Pemprov dan lain-lain," ujar Sambodo Purnomo Yogo, Rabu (15/12).

Sambodo menyebutkan, dalam FGD yang rencananya akan dilaksanakan pada Selasa 21 Desember 2021, akan mengundang sejumlah pihak terkait.

"Ada IMI, Pemprov, Dishub, komunitas, bengkel macam-macam, pokoknya seluruh instansi terkait. Termasuk juga komunitas balap liar diundang," jelas Sambodo.

Wacana untuk memfasilitas balap liar di Jakarta pertama kali diungkap Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil

Imran. Menurutnya, jika kegiatan balap liar difasilitasi di Jakarta agar bisa melakukan kegiatan kompetisi balap yang legal, maka balap liar tidak lagi meresahkan masyarakat.

Hal tersebut kata Fadil Imran berkaca dengan maraknya aksi balap liar yang dilaksanakan sejumlah anak muda disekeliling ruas jalan ibukota Jakarta pada malam hari.

"Anak-anak kita ini suka yang aneh-aneh, jalan raya dipakai balap sehingga mengganggu orang lain, membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain," ujar Fadil Imran usai upacara penutupan pelatihan peningkatan kemampuan Tim Patroli Perintis Presisi di lapangan Mapolda Metro Jaya.

Fadil berencana mengadakan balapan untuk para pembalap liar di Jakarta dan wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Makanya saya rencananya mau membuat balapan untuk para pembalap jalanan (balap liar). Jadi balap liar itu saya fasilitasi, bukan

dimusuhi, bukan ditanggapi, akan saya fasilitasi dia," ungkap Fadil Imran.

Ia melihat fenomena banyaknya tantangan di media sosial instagram tentang balapan liar di malam hari agar dilakukan pembinaan.

"Kan ada itu Bekasi Night Ride, Kemayoran Night Ride, ada lagi macam-macam itu yang tantangannya di Instagram itu. Saya sudah banyak masukan dari masyarakat yang minta tolong agar balapan liar di malam hari dibina," katanya.

Fadil Imran mengaku tengah berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya serta pemangku kepentingan lainnya untuk bisa memfasilitasi hal rencana tersebut.

"Di Jakarta insya Allah saya akan buat program untuk menggendong anak-anak muda yang biasa balapan di jalan. Kita buat semacam sirkuit dengan event bulanan. Jadi tidak perlu dia malam-malam. Kalau perlu kita buat sirkuit malam atau siang. Ditlantas sedang memikirkan dimana lokasinya," tandasnya. ● lus

IDN/ANT



PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA

Sejumlah petugas memusnahkan barang bukti rokok ilegal saat ungkap kasus di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (15/12). Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo memusnahkan 8.151.436 batang rokok ilegal yang tidak dilengkapi cukai atau menggunakan cukai bekas, 45 cartridge hasil pengolahan tembakau lainnya atau HPTL rokok elektrik (liquid vape) dan 112.490 ml minuman mengandung etil alkohol (MMEA) hasil penindakan selama kurun lima bulan.